



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA BARAT
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh :

DONNY KURNIAWAN

07 955 003

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**



No Alumni Universitas

DONNY KURNIAWAN

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 01 Maret 1986 b). Nama Orang Tua : Anismar dan Irnawati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 07955003 f). Tanggal Lulus : 20 November 2010 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,27 i). Lama Studi : 3 tahun j). Alamat Orang Tua : Kel. Payolansek RT 02 RW 03 Kec. Payakumbuh Barat

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Skripsi S-1 Oleh : **Donny Kurniawan** Pembimbing : **Firdaus, SE. M.Si, Ak**

Abstrak

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten di Sumatera Barat.

Data yang digunakan adalah data primer yang telah dipublikasikan dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Independent Variable (variabel bebas) terhadap Dependent Variable (variabel terikat). Independent Variable (variabel bebas) pada penelitian ini adalah : Kinerja Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi. Sedangkan Dependent Variable (variabel terikat) adalah pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Rasio kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat, Rasio efektifitas dan Rasio efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara simultan Kinerja Keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten di Sumatera Barat.

Keyword: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 November 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Riza Reni Yenti, SE. M.Si. Ak	Nini Syofri Yeni, SE. M.Si. Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

DR. H. Yuskar, SE. MA, Ak
NIP. 196009111986031001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan terhadap paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Otonomi daerah menurut Undang Undang ini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap ini merupakan fase pertama dari pelaksanaan otonomi daerah.

Fase kedua otonomi daerah ditandai dengan adanya reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan tiga peraturan di bidang keuangan negara. Ketiga peraturan tersebut adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara.

Setelah lebih dari lima tahun reformasi sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai kendala yang dihadapi serta pro dan kontra. Berbagai usahapun dilakukan untuk menyempurnakan sistem tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan amandemen Undang Undang Otonomi Daerah.

Proses ini merupakan awal dari fase ketiga dalam proses otonomi daerah di Indonesia. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 masing-masing digantikan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah menurut Undang Undang ini adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga fase tersebut dijelaskan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah. Proses ini membutuhkan pencrapan prinsip-prinsip *good governance* yang menyeluruh dan terpadu. Adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah :

1. Partisipasi. Mendorong setiap masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan semua potensi yang ada dan daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari Pemerintah Pusat.

Penggalian dan pengembangan potensi ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dilakukan pengukuran melalui kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan beberapa rasio diantaranya rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, rasio efisiensi keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dengan menggunakan alat ukur rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten di Sumatera Barat. Pengujian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali . 2005 . *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* . Jakarta . PT. Raja Grafindo Persada
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- BAPPEDA . 2007 . *Statistik Pembiayaan Pembangunan 2006-2007* . Padang . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- BAPPEDA . 2006 . *Statistik Pembiayaan Pembangunan 2005-2006* . Padang . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- BPS . 2006 . *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2005* . Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- BPS . 2007 . *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2006* . Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- BPS . 2008 . *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2007* . Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- Bratakusumah, Deddy Supriady . 2003 . *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* . Jakarta . PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiarto, Bambang . 2007 . *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah* . Seminar Ekonomi Daerah . Surabaya
- Dwirandra, A.A.N.B . 2007 . *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006* . Simposium Nasional Akuntansi X
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: BPFE, UI.